

ABSTRAK

Pemanfaatan Lembaran Daerah Sebagai Terbitan Resmi Pemerintah di Perpustakaan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Oleh : Ezzy Mutia/2014

Dalam makalah ini dibahas bagaimana pemanfaatan lembaran daerah di Perpustakaan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan kendala-kendala dalam pemanfaatan lembaran daerah di Perpustakaan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Kajian ini bertujuan, yaitu: (1) mendeskripsikan pemanfaatan lembaran daerah di Perpustakaan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat; (2) mendeskripsikan kendala-kendala dalam memanfaatkan lembaran daerah di Perpustakaan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Data dikumpulkan melalui metode kualitatif dan metode deskriptif yang menggunakan observasi dan wawancara secara langsung dengan Kepala Bagian dan Staf di Perpustakaan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang memanfaatkan lembaran daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah. Dalam makalah ini dibahas beberapa teori penguat, yaitu teori tentang pengertian terbitan pemerintah, fungsi terbitan pemerintah, jenis terbitan pemerintah, pengertian tentang lembaran daerah, manfaat lembaran daerah, fungsi lembaran daerah, teori tentang pengertian peraturan daerah dan fungsi peraturan daerah.

Berdasarkan pembahasan disimpulkan, yaitu: (1) Pemanfaatan lembaran daerah di Perpustakaan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dimanfaatkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Dilihat dari segi pemanfaatan lembaran daerah sebagai bahan rujukan, sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan pengambil keputusan, sebagai bahan laporan dan sebagai bahan penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain dalam kegiatan pemerintahan daerah. (2) Kendala dalam pemanfaatan lembaran daerah sebagai bahan rujukan, bahan pertimbangan, bahan perbandingan, bahan pengambil keputusan, bahan laporan, dan bahan penelitian, yaitu banyaknya koleksi lembaran daerah yang hilang, kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola perpustakaan, koleksi tidak tertata rapi menyebabkan informasi sulit didapatkan, kurangnya sarana dan prasarana seperti rak koleksi, banyak data yang belum dihimpun ke dalam komputer menyebabkan masyarakat belum dapat mengakses semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan daerah dalam satu tahun.